

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Atmasasmita, Romli. 2015. *Sisi Lain Akuntabilitas KPK Dan Lembaga Pegiat Anti-Korupsi*. Jakarta : Gramedia Pustaka
- Atmasasmita, Romli, 2010. *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Jakarta : Prenada Media Group
- Atmaja, Gede. *Filsafat Hukum Dimensi Tematis dan Historis*, Setara Pers, Malang, 2013
- Andi, Hamzah, 2000. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta : PT. Sinar Grafika
- Andi, Hamzah, 2004. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Revisi, Jakarta : Sinar Grafika, Cetakan Ketiga
- Bakir, Herman. 2013. *Filsafat Hukum (Tema – tema Fundamental Keadilan Dari Sisi Ajaran Fiat Justicia Ruat Caelum)*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Bakker, Anton dan Zubair, Achmad Charris. 1990. *Metodologi Penelitian Filsafat*. Yogyakarta: Kanisius
- Erwin, Muhammad. 2016. *Filsafat Hukum (Refleksi Kritis Terhadap Hukum Dan Hukum di Indonesia Dalam Dimensi Ide Dan Aplikasi)*. Jakarta : PT .Raja Grafindo Persada
- Mertokusumo, Soedikno. 1999, *Mengenal Hukum : Sebuah pengantar*. Yogyakarta : Liberty
- Rahardjo. Satjipto, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung : PT.Citra Aditya Bakti
- Simons, 1993, *Leerboek van het Nederlandse Strafrecht*, P. Noordhof N.V., Groningen – Baavia
- Sitompul, Josua. 2012. *Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw: Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, Jakarta : Tatanusa
- Siregar, Bismar. 1996. *Rasa Keadilan*. Surabaya:PT.Bina Ilmu
- Suseno, Murni. 1987, *Etika Dasar (Masalah – masalah Pokok Filsafat Moral)*. Yogyakarta : Kanisius

Saloko, Angger. 2017, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Negeri

Van Hattum, 1953, *Hand en Leerboek van het Nederlanse Strafrecht I*, S. Gouda uint D. Brouwer en Zoon, Arnhem, Martinus Nijhoff, s' Gravenhag

Jurnal, Skripsi, dan Laporan Penelitian

Akbar, Muhammad Rizal, 2014. *Kebijakan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Penanggulangan Korupsi Melalui Operasi Tangkap Tangan*. Lampung : Skripsi Universitas Lampung

Tri, Bambang Bawono, 2013. *Analisis Yuridis Tindakan Tangkap Tangan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Gratifikasi*. dalam Laporan Penelitian Universitas Islam Sultan Agung Semarang

Edmon, Makarin, 2010. *Analisis terhadap Kontroversi Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Intersepsi yang Sesuai Hukum (Lawful Interception)*. dalam Jurnal Hukum dan Pembangunan

Himawati, Putri, 2018. *Operasi Tangkap Tangan Dalam Penanganan Kasus Korupsi Hand Arrest Operation In Handling Corruption Case*. dalam Negara Hukum Vol 9. <http://www.dpr.go.id/>

Nola, Luthvi Febriyka, 2013. *Operasi Tangkap Tangan oleh KPK*. dalam Info Singkat. Vol. V No. 24/II/P3DI/. <http://www.dpr.go.id/>

Oktavianto, R. Abheseka, N. 2019. *Evaluasi Operasi Tangkap Tangan KPK*. dalam Jurnal Anti Korupsi INTEGRITAS. 5 (2) :119 – 120. <https://www.kpk.go.id/id/splash>

Surat kabar dan Pustaka Online

Atmasasmita, Romli, "OTT KPK", 3 Oktober 2017, <https://nasional.sindonews.com/read/1244895/18/ott-kpk-1506991818/13>, diakses 3 Juni 2020

Darini, R.. 2011. *Korupsi di RRT: Perspektif Sejarah*. INFORMASI. <https://doi.org/10.21831/informasi.v1i1.4464>, diakses 24 Juli 2020

Hasan, R. A. 2019. *Indeks Korupsi Internasional: Posisi RRT dan AS Turun, RI Naik*. <https://www.liputan6.com/global/read/3882732/indeks-korupsi-internasional-posisi-rrt-dan-as-turun-ri-nai>, diakses 22 Juli 2020

kbbi.kemendikbud.co.id, diakses pada 29 Juni 2020

Lidway ,Ahmad . 327 Orang terjaring OTT KPK sepanjang 2015 – 2019 .
://<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/12/18/327-orang-terjaring-ott-kpk-sepanjang-2015-2019#> , diakses 23 Juni 2020

<https://wearesocial.com/digital-2020> , diakses pada 14 Juli 2020 pukul 3.19

<https://www.itb.ac.id/news/read/57074/home/penindakan-korupsi-butuh-kompetensi-di-bidang-teknologi> , diakses pada 22 Juli 2020

“Mulyana Minta Kewenangan Untuk Menyadap Dibatalkan”, [merdeka.com](https://www.merdeka.com/peristiwa/mulyana-minta-kewenangan-untuk-menyadap-dibatalkan-edlwcy.html),
<https://www.merdeka.com/peristiwa/mulyana-minta-kewenangan-untuk-menyadap-dibatalkan-edlwcy.html> , diakses 1 juli 2020

Peraturan Perundang – undangan

Undang – Undang No.3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang – Undang No . 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi , Kolusi , dan Nepotisme

Undang – Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang – undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

Undang -undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 1 ayat 3 tentang Indonesia sebagai Negara Hukum

Undang – undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana

Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang – Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Keputusan Mahkamah Konstitusi dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat

Ketetapan MPR Republik Indonesia No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Kolusi , Korupsi , dan Nepotisme

Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 006/PUU-I/2003

Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 5/PUU-VIII/2010

putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 20/PUU-XIV/2016